

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMA NEGERI 5 BALIKPAPAN

Kafiefa Windiariesti¹ , Martinus Nanang²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 5 Balikpapan. Penelitian ini juga menganalisis implementasi dari kebijakan Program Indonesia Pintar berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, indikator proses dan strategi pelaksanaan : sosialisasi pengetahuan tentang PIP, pengajuan nama calon penerima PIP, penetapan nama penerima PIP, tercapainya tujuan dan sasaran program, serta indikator efektivitas pelaksanaan : ketepatan waktu, kesesuaian dan pemanfaatan dana. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang sudah didapatkan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 5 Balikpapan berjalan cukup efektif. Namun dari ketujuh indikator tersebut dua diantaranya tidak berjalan efektif, hal ini disebabkan masih kurangnya terkait sosialisasi Program Indonesia Pintar oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur maupun SMA Negeri 5 Balikpapan, dan ketidakpastian jadwal pencairan dana Program Indonesia Pintar.

Kata Kunci : Kebijakan, Efektivitas Program, Program Indonesia Pintar

Pendahuluan

Pendidikan ialah salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam suatu agenda pembangunan nasional. Pembangunan Pendidikan memiliki peran sangat penting karena hal ini merupakan yang signifikan dalam mencapai kemajuan berbagai bidang kehidupan, seperti; ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dengan adanya pendidikan dapat mengembangkan potensi dalam diri manusia,

¹ Mahasiswi Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: kafiefawindi2000@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

melalui sosialisasi dan pengembangan nilai-nilai. (Winarti et al., 2022). Pemerintah bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, tetapi tidak semua warga negara Indonesia dapat mengakses pendidikan, sehingga menghambat tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar.

Faktor yang kurang mendukung masyarakat tidak bisa mendapatkan Pendidikan formal salah satunya adalah masalah kemiskinan, dan kemiskinan pula yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki andil dalam merancang perundang-undangan, upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia satu diantaranya adalah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar.

Upaya pemerintah dalam hal ini mengatasi masalah pendidikan tersebut antara lain merumuskan kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga yang kurang sejahtera sejahtera dan agar dapat mengurangi penelantaran dalam pendidikan anak, maupun pemenuhan pendidikan terhadap anak putus sekolah. Melalui Program Indonesia Pintar yang merupakan penyempurnaan dari Program Siswa Tidak Mampu (BSM) yang bertujuan untuk mencegah siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan studi karena kesulitan ekonomi dan untuk menarik siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan studi, agar kembali menempuh pendidikan sekolah. Program ini merupakan implementasi Nawa Cita di bidang pendidikan (Nugroho dan Kuniawan, 2017).

PIP ditandai dengan pemberian kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebagai bantuan tunai bersyarat, manfaat KIP akan diterima hanya jika anak terdaftar atau terdaftar di lembaga pendidikan: sekolah ataupun madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar (Kejar paket A /B/C), fasilitas pelatihan tentunya. Meski merupakan program prioritas, pelaksanaan PIP menemui berbagai kendala. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan observasi yang bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas terhadap implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 5 Balikpapan. Maka, rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah : Apakah pelaksanaan Program Indonesia Pintar efektif di SMA Negeri 5 Balikpapan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai efektivitas Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 5 Balikpapan.

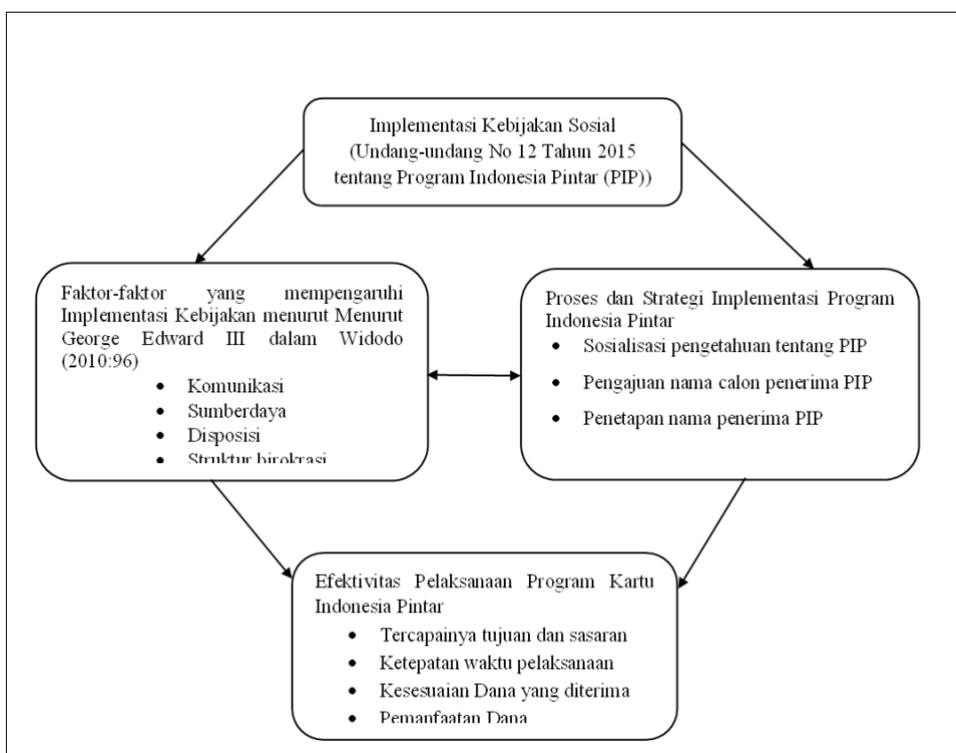
Kerangka Konseptual

Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino juga mendefinisikan kebijakan, “Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan/kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan kebijakan sosial menurut Bassant, Watts, Dalton dan Smit (dalam Suharto Edi 2008) “In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people’s live by providing a range of income support, community services and support programs”. Yang artinya, hal itu menunjukkan bahwa kebijakan sosial sebagai upaya dari apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan berbagai program dukungan maupun pendapatan, layanan masyarakat dan program manfaat lainnya.

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan program pemerintah, diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyaknya ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Oleh sebab itu dengan adanya Program Indonesia Pintar, diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya dan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini dapat dimanfaatkan siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas dalam memenuhi kebutuhan dasar terutama bisang pendidikan.

Efektifitas berasal dari Bahasa Inggris yakni kata *effecty*. Artinya, Anda akan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dilansir oleh Arthur G. Gedeian dkk, dalam bukunya *Organization Theory and Design*, efektivitas didefinisikan sebagai ; “That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian et al, 1991: 61). Pengertian lain Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output dalam pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Efektivitas kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi salah satu faktor terlaksananya Program Indonesia Pintar (PIP). Untuk mengukur efektivitas suatu program, dalam hal ini Program Indonesia Pintar (PIP), dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi serta proses dan strategi pelaksanaan, diantaranya : tercapainya tujuan dan sasaran program, ketepatan waktu, kesesuaian dan pemanfaatan dana. Dengan demikian, pelaksanaan efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dikatakan berjalan dengan baik.



Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Hasil Penelitian

Profile SMA Negeri 5 Balikpapan

SMAN 5 Balikpapan merupakan satuan pendidikan dalam jenjang Sekolah Menengah Atas yang saat ini berada di Jl. Abdi Praja Blok F1 No.119, Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan kode pos 76115 Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. SMA Negeri 5 Balikpapan merupakan sekolah Alih Fungsi. Semula sekolah ini bernama SGB, berubah menjadi SGA, kemudian menjadi SPG, dan pada tahun ajaran 1989/1990 SPG berubah fungsi menjadi SMA Negeri 5 Balikpapan. SMA Negeri 5 Balikpapan didirikan pada tanggal 5 Juni 1989 berdasarkan Surat Keputusan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur No.0342/V/1989.

Mulai tahun pelajaran 1997-1998 SMA Negeri 5 Balikpapan memiliki dua lokasi. Lokasi I: untuk kelas 2 dan 3 ada di Jl K.P Tendeau Gunung Pasir, sedangkan di lokasi II: untuk kelas 1 ada di Jl. Abdi Praja Blok F1 No.119 Ring Road dan kemudian menjadi lokasi tetapnya keseluruhan hingga saat ini. Fasilitas-fasilitas yang disediakan SMAN 5 Balikpapan diantaranya, listrik

dalam membantu kegiatan belajar mengajar di kelas-kelas. SMAN 5 Balikpapan menggunakan sumber listrik yang berasal dari PT Pembangkit Listrik Negara (PLN). SMAN 5 Balikpapan juga memfasilitasi akses internet (Wifi) yang dapat dipergunakan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar agar jadi lebih mudah. Selain itu, provider yang digunakan oleh SMAN 5 Balikpapan untuk sambungan internet berupa sambungan kabel internet (Serat Optik).

Implementasi Program Indonesia Pintar

Implementasi adalah tata cara yang menyangkut pelaksanaan, pengorganisasian, dan pencarian alternatif setelah diputuskan berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Sanusi dalam M. Hasbullah (2014:93). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 5 Balikpapan telah diterapkan sejak peluncuran program oleh pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 12 Tahun 2015. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut dengan PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak/kurang mampu membiayai Pendidikan (Peserta Didik Afirmasi).

Berdasarkan hasil penelitian di atas dalam melaksanakan suatu kebijakan Program Indonesia Pintar, tentu terdapat aktor pelaksana. Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyaknya ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Dalam pembahasan ini pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi) dan pihak SMAN 5 Balikpapan berperan sebagai pelaksana program.

Faktor-faktor Implementasi Program Indonesia Pintar

Dalam upaya pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang dilakukan pemegang kepentingan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur maupun pihak SMA Negeri 5 Balikpapan dalam implementasi Program Indonesia Pintar, tentunya dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan menurut Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Pertama komunikasi kebijakan merupakan suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana program dari pusat mengkomunikasikan Program Indonesia Pintar kepada sekolah-sekolah menengah atas di provinsi Kalimantan Timur yang terdaftar di dalam data dari Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui website resmi www.pip.kemdikbud.go.id.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi memiliki misi dan tujuan yakni mengenalkan program PIP 2022 ke seluruh sekolah di kabupaten/kota dan masyarakat sekitar, mendorong kepala sekolah untuk melaporkan siswanya sesuai dengan prioritas yang ditargetkan, koordinasi dan sinkronisasi program dan pelaksanaan pembinaan di tingkat pusat, serta mengikuti kriteria teknis dalam pelaksanaan PIP.

Ditemukan fakta dilapangan jika dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMAN 5 Balikpapan berjalan cukup efektif. Terkait dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) yakni; Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur birokrasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi memiliki misi dan tujuan yakni mengenalkan program PIP 2022 ke seluruh sekolah di kabupaten/kota dan masyarakat sekitar, mendorong kepala sekolah untuk melaporkan siswanya sesuai dengan prioritas yang ditargetkan, koordinasi dan sinkronisasi program dan pelaksanaan pembinaan di tingkat pusat, serta mengikuti kriteria teknis dalam pelaksanaan PIP.

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam yang dilakukan penulis dengan Bapak Agus Budianto selaku Wakil Kepala Sekolah, SMA Negeri 5 Balikpapan pernah mendapatkan informasi terkait Program Indonesia Pintar tersebut sejak awal peluncuran Program Indonesia Pintar dari pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mengkonfirmasi bahwa biasanya penyebaran informasi terkait PIP kepada sekolah-sekolah menengah atas melalui via media komunikasi elektronik (via whatsapp) termasuk di SMAN 5 Balikpapan.

Proses dan Strategi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Dalam praktik pelaksanaan program Indonesia Pintar di SMAN 5 Balikpapan, terdapat proses dan strategi diantaranya ; Sosialisasi pengetahuan tentang PIP, Pengajuan nama calon penerima PIP, Penetapan nama penerima PIP. Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis dengan pihak SMAN 5 Balikpapan, terkait sosialisasi Program Indonesia Pintar pernah dilakukan namun cukup lama, ketika diluncurkan tahun 2016 atau 2017 dari Dinas Pendidikan, jika terkait sosialisasi, komunikasi dan koordinasi pernah dilakukan kepada guru-guru setiap meeting di awal pekan. Sosialisasi kepada siswa-siswi SMAN 5 Balikpapan oleh pihak sekolah juga pernah dilakukan pada awal adanya PIP.

Namun, berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada siswa-siswi penerima ataupun calon penerima Program Indonesia Pintar, Muhajir Nur Ramadhan dan Fitri Rahman Nisa mengkonfirmasi jika tidak mengetahui adanya sosialisasi Program Indonesia Pintar di SMAN 5 Balikpapan.

Terkait dalam pengajuan dan penetapan calon nama siswa Program Indonesia Pintar. Peserta didik yang didata berdasarkan hasil perbandingan data peserta didik terbaru yang tercatat sebanyak 78 siswa pada Dapodik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdaftar dalam PIP, proses tersebut dilakukan secara daring (dalam jaringan) dan otomatis dan pihak SMAN 5 Balikpapan akan langsung menginformasikan kepada siswa-siswi penerima maupun calon penerima Program Indonesia Pintar.

Sarana dan Prasarana terkait strategi penyuluhan dan penyaluran dana yang diterima siswa-siswi SMAN 5 Balikpapan, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan yakni, masih kurangnya sosialisasi penyuluhan terkait PIP, namun peran dan tanggung jawab staf PIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalimantan Timur maupun SMAN 5 Balikpapan cukup membantu dalam proses pelaksanaan PIP.

Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi salah satu faktor terlaksananya Program Indonesia Pintar (PIP). Untuk mengukur efektivitas suatu program, dalam hal ini Program Indonesia Pintar (PIP), dapat dilihat dari tercapainya tujuan dan sasaran program, ketepatan waktu, kesesuaian dan pemanfaatan dana. Tingkat ketepatan program dengan target yang telah ditetapkan menunjukkan ketepatan tujuan program. Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan untuk anak-anak berusia 6 hingga 21 tahun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses mereka, dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pendidikan tingkat dasar hingga menengah atas. Program Indonesia Pintar juga berupaya mencegah anak-anak dari potensi berhenti sekolah atau gagal menyelesaikan pendidikannya karena masalah keuangan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh yakni, para pelaksana Program Indonesia Pintar mampu memahami tujuan dan sasaran program di lapangan. Fakta bahwa para penerima Program Indonesia Pintar telah memenuhi kebutuhan pendidikan mereka menunjukkan keberhasilan program berdasarkan tujuan dan sasaran penerima Program Indonesia Pintar itu sendiri.

Pencairan dana tingkat Sekolah Menengah Atas akan tersalur secara otomatis dari pusat Kemendikbud, dan siswa dapat melakukan penarikan Dana Program Indonesia Pintar menggunakan Buku Tabungan atau Kartu Debit di Bank yang telah ditetapkan (Bank BNI) . Pencairan dana tingkat Sekolah Menengah Atas senilai Rp. 1.000.000,- . Dana tersebut yang telah cair digunakan telah sesuai dengan tujuan PIP itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan penerima Program Indonesia Pintar, dana bantuan juga bisa dimanfaatkan membeli keperluan sekolah seperti ;

Membeli buku dan alat tulis, membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya).

Dengan demikian, pelaksanaan efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dikatakan berjalan cukup baik. Tujuan dan sasaran Program Indonesia Pintar di SMAN 5 Balikpapan ini telah sesuai, yakni adalah untuk membantu siswa-siswi dengan latar keluarga berpenghasilan rendah atau rentan yang masih bersekolah dan siswa-siswi yang masih terdaftar di kelas di data Dapodik tingkat Sekolah Menengah Atas. Akan tetapi ketepatan waktu pencairan dana yang diatur oleh pusat, tidak memiliki konsistensi waktu yang jelas, karena berdasarkan data yang diterima oleh SMAN 5 Balikpapan, hanya sebagian dari siswa-siswi yang mendapatkan pencairan dana namun, sebagian lagi belum cair.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan program Indonesia Pintar di SMA Negeri 5 Balikpapan sudah berjalan cukup efektif, berdasarkan pada Terkait dengan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam hal ini, peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pihak SMA Negeri 5 Balikpapan dalam berupaya melaksanakan PIP. Dalam praktik pelaksanaan program Indonesia Pintar di SMAN 5 Balikpapan, terdapat proses dan strategi diantaranya; Sosialisasi pengetahuan tentang PIP, Pengajuan nama calon penerima PIP, Penetapan nama penerima PIP.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan transkrip wawancara dengan pihak SMAN 5 Balikpapan sendiri hanya terjadi satu kali ketika peluncuran informasi terkait PIP, begitu juga dengan pihak SMAN 5 Balikpapan. Siswa-siswi penerima maupun calon penerima PIP tidak mengetahui adanya sosialisasi di SMAN5 Balikpapan. Mekanisme pengajuan nama dan penetapan PIP sudah sesuai dengan peraturan, karena hal itu terdaftar otomatis di laman Data Dapodik. Pihak SMAN 5 Balikpapan akan menyampaikan kepada siswa-siswi penerima PIP jika data mereka telah di verifikasi dan terdaftar. Mekanisme dilakukan dengan memantau secara internal dengan mengakses informasi terbaru perkembangan PIP dari laman resmi PIP maupun bisa dengan aplikasi SIPINTAR.

Kesesuaian tujuan dan ketepatan sasaran penerima PIP di SMAN 5 Balikpapan ini sudah tepat sasaran, akan tetapi ketepatan waktu pencairan dana PIP ini sendiri tidak terjadwal dengan jelas. ketepatan waktu penyaluran PIP bantuan PIP diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan kesesuaian penggunaan dana PIP, ketepatan jumlah dana PIP dana yang disalurkan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 1.000.000,- pada setiap peserta didik sesuai SK, penerima PIP di SMAN 5 Balikpapan

memanfaatkan dana tersebut untuk membeli keperluan sekolah, sesuai dengan tujuan dari Program Indonesia Pintar

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan SMAN 5 Balikpapan
Sebaiknya sosialisasi, komunikasi, dan penyebaran informasi terbaru terkait Program Indonesia Pintar lebih ditingkatkan dengan baik antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak SMAN 5 Balikpapan. Begitu pula pihak SMAN 5 Balikpapan dan penerima bantuan PIP maka sebaiknya pihak sekolah dapat membentuk tim pengaduan dan pemantauan mengenai bantuan Program Indonesia Pintar melalui whatsapp dan aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial sekolah.
2. Bagi Puslapdik Kemdikbud
Sebaiknya untuk waktu penyaluran dana agar lebih transparan dan terjadwal disalurkan
3. Bagi Masyarakat atau penerima/calon penerima PIP
Sebaiknya masyarakat maupun siswa-siswi penerima atau calon penerima PIP dapat memahami laman resmi PIP dan aplikasi SIPINTAR untuk bisa melakukan pemantauan penggunaan dana PIP yang dapat dilakukan secara online. Dengan melakukan pembaruan pada website SIPINTAR untuk penerima PIP agar dapat mengirimkan bukti pembelajaran dan scan buku rekening dengan sehingga tidak salah tujuan untuk meningkatkan tanggungjawab menggunakan dana tersebut.

Daftar Pustaka

- Dian Ferdina Nasution. (2017). "Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjungbalai
- Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantini, K. (2021). Implementasi kebijakan program indonesia pintar (pip) pada jenjang sekolah dasar. *Kinerja*, 18(4), 539–546.
- Kemendikbud RI, T. (2018). *Kajian Program Indonesia Pintar (PIP): Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) Untuk Mengikuti Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar (PIP)*.
http://repositori.kemdikbud.go.id/15823/1/Kajian_program_Ind_Pintar.pdf
- Murlianti, S., & Nanang, M. (2022). *Analysis of the Lockdown Policy During the Covid-19 Pandemic According to Hermeneutics Social*

- Studies*. 12(1), 965–972.
- PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALITBANG KEMENDIKBUD. (2017). *Efektifitas program indonesia pintar (pip) dan kontribusinya terhadap kedisiplinan dan prestasi belajar siswa*. 6. <http://litbang.kemdikbud.go.id>
- Setyawati, S. (2018). *Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bagi Siswa SMK Di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar)*. 12, 1–106.
- Suardi, W., Priyo Purnomo, E., & Salsabila, L. (n.d.). PENERAPAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN “PROGRAM INDONESIA PINTAR” DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Jurnal MODERAT*, 7(3).
- Winarti, H. T., Lukman, A. I., & Akbar, M. F. (2022). *Analysis of Factors Influencing the Success in Implementing Non- Formal Education Programs for MSMEs Actors in Rumah BUMN Samarinda*. 9(1), 14–25.